

Optimalisasi Modal Sosial: Peran Dasawisma dalam Pembangunan Desa

Novayanti Sophia Rukmana Syafrin

Universitas Negeri Makassar

e-mail: novayanti@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran dan dampak kelompok Dasawisma dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sosial. Dasawisma sebagai gerakan akar rumput telah berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan aksi kolektif. Penelitian ini menganalisis berbagai inisiatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini dengan fokus pada strategi mereka dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi lokal, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan peningkatan pendidikan. Metode yang digunakan mencakup analisis kualitatif melalui wawancara, diskusi kelompok terarah, dan observasi partisipatif. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya Dasawisma dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup di tingkat masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah lokal dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat dampak inisiatif Dasawisma. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi yang bertujuan memanfaatkan pendekatan berbasis komunitas untuk tujuan pengembangan sosial yang lebih luas.

Kata Kunci :

Dasawisma, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sosial, Partisipasi Komunitas, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan suatu proses transformasi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menjadi penting mengingat desa merupakan basis terkecil dari suatu negara yang menjadi fondasi bagi pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, tok-

oh masyarakat, maupun seluruh lapisan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik semata, tetapi juga meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan desa yang holistik dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat desa menjadi kunci utama dalam mengidentifikasi kebutuhan,

merencanakan program, melaksanakan kegiatan, serta memantau dan mengevaluasi hasil pembangunan. Selain itu, pembangunan desa juga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal regulasi, pendanaan, serta fasilitasi program-program pembangunan. Peran lembaga kemasyarakatan desa, seperti *Dasawisma*, juga sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memobilisasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Seringkali terdapat berbagai permasalahan yang menghambat proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya keterlibatan masyarakat, minimnya sosialisasi program, atau rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data dari BPS tahun 2021 menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat Berdasarkan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menunjukkan presentase desa dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan pembangunan desa hanya mencapai 47,66%. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Selain itu, permasalahan lain yang kerap muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.

Desa-desanya di daerah terpencil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses program-program pembangunan karena kurangnya alokasi anggaran dan fasilitas pendukung yang memadai. Rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat desa juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini juga didukung oleh data dari Kemendes PDTT tahun 2020 yang menunjukkan bahwa hanya 31,2% kepala desa yang berpendidikan S1 atau lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya keberlanjutan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Seringkali program-program tersebut bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan setelah berakhirnya pendanaan atau intervensi dari pihak luar. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kepemilikan program oleh masyarakat desa atau minimnya upaya untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Keterbatasan pendanaan berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022, rata-rata anggaran desa hanya sekitar Rp1,4 miliar per tahun. Jumlah ini dinilai masih terbatas untuk membiayai seluruh program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Studi yang dilakukan oleh SMERU Research Institute pada tahun 2019 menemukan bahwa sekitar 40% program pemberdayaan masyarakat desa

tidak berlanjut setelah berakhirnya pendanaan dari pemerintah atau lembaga donor.

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Modal sosial, seperti jaringan sosial, norma, dan kepercayaan, memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi program pembangunan desa. Modal sosial merupakan konsep yang sangat relevan dalam mengkaji fenomena pembangunan desa. Modal sosial mengacu pada jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pembangunan desa, modal sosial dapat menjadi modal penting yang mendukung keberhasilan implementasi program-program pembangunan. Jaringan sosial yang kuat dalam masyarakat desa dapat memperlancar penyebaran informasi, mobilisasi sumber daya, dan koordinasi aksi kolektif dalam mendukung program pembangunan. Norma-norma seperti rasa saling percaya, gotong royong, dan tanggung jawab bersama dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Kepercayaan yang terjalin antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat juga menjadi modal penting untuk membangun kemitraan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dengan demikian, modal sosial seperti jaringan sosial, norma, dan kepercayaan, memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi program pembangunan

desa. Semakin kuat modal sosial yang dimiliki suatu masyarakat desa, semakin besar potensi keberhasilan program pembangunan yang dijalankan. Oleh karena itu, memahami dan memanfaatkan modal sosial menjadi kunci penting dalam upaya mengoptimalkan pembangunan desa secara berkelanjutan. Konsep modal sosial telah banyak diteliti dan diakui sebagai faktor penting dalam pembangunan masyarakat. Modal sosial mengacu pada jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial dapat membantu mobilisasi sumber daya, penyebaran informasi, dan aksi kolektif dalam implementasi program pembangunan (Greeley, 1997; Putnam, 2001). Dalam konteks pembangunan desa, modal sosial seperti organisasi lokal, norma gotong royong, dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, berperan penting dalam mendukung partisipasi masyarakat dan keberhasilan program pembangunan (Agrawal & Gibson, 1999; Uphoff, 1992). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengakui peran lembaga kemasyarakatan desa, seperti Dasawisma dalam membantu pelaksanaan program pembangunan desa. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa modal sosial juga dapat memiliki sisi negatif, seperti eksklusivitas sosial dan penguatan kelompok dominan (Milana & Maldaon, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana modal sosial khususnya Dasawisma dapat dioptimalkan untuk mendukung implementasi program pembangunan desa secara efektif dan inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu telah memberikan berbagai wawasan penting tentang peran modal sosial dalam pembangunan desa, terutama melalui jaringan sosial seperti kelompok Dasawisma (Kesby, 2005). Dalam penelitiannya menyoroti pentingnya modal sosial, yang terdiri dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan, sebagai elemen kunci yang mendukung partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Kesby menunjukkan bahwa modal sosial dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan memperkuat kerjasama dan meningkatkan keterlibatan aktif warga dalam proyek-proyek pembangunan. Namun, penelitian ini cenderung deskriptif dan kurang memberikan panduan praktis tentang bagaimana modal sosial dapat dioptimalkan dalam konteks yang lebih spesifik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk penelitian yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Selanjutnya, Anggraini (2021) dan Safitri (2012) memberikan bukti empiris yang kuat tentang peran jaringan sosial, khususnya Dasawisma dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung pembangunan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dasawisma tidak hanya berperan dalam menyebarkan informasi dan memobilisasi partisipasi, tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pertukaran pengetahuan dan keterampilan. Namun penelitian ini kurang menyoroti tantangan yang dihadapi oleh jaringan sosial seperti Dasawisma dalam

menghadapi dinamika sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Selain itu, Sulaeman, Murti, dan Waryana (2015) menekankan pentingnya norma-norma sosial seperti gotong royong, saling percaya, dan tanggung jawab bersama dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa norma-norma ini berperan penting dalam memfasilitasi kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa, serta dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pembangunan. Studi ini cenderung lebih fokus pada aspek normatif dan kurang membahas bagaimana tantangan-tantangan konkret yang dihadapi dapat diatasi melalui penerapan norma-norma tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa modal sosial, melalui jaringan sosial seperti Dasawisma, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Namun, ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih aplikatif dan kontekstual yang dapat memberikan panduan praktis tentang bagaimana elemen-elemen modal sosial ini dapat dioptimalkan dalam konteks pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian terdahulu dengan menyediakan analisis yang lebih mendalam dan bukti empiris yang lebih kaya tentang peran Dasawisma dalam pembangunan desa melalui optimalisasi modal sosial. Dengan demikian, diharapkan penelitian

ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

TINJAUAN TEORETIS

Modal sosial merupakan konsep sentral dalam memahami dinamika pembangunan desa. Sebagaimana didefinisikan oleh Putnam (2001), modal sosial merujuk pada fitur organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan bersama. Dalam konteks pembangunan desa, modal sosial dapat dilihat sebagai sumber daya yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Konsep ini erat kaitannya dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Haque dan Mantode (2013) yang menekankan pentingnya memberikan kekuasaan dan kendali kepada masyarakat atas keputusan dan sumber daya yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat, sebagai proses peningkatan kapasitas dan partisipasi, dapat dipahami lebih lanjut melalui teori ACTORS yang juga dikembangkan oleh Haque dan Mantode (2013). Teori ini menyediakan kerangka untuk memahami pemberdayaan masyarakat melalui enam komponen: *authority* (wewenang), *confidence and competence* (kepercayaan diri dan kompetensi), *trust* (kepercayaan), *opportunity* (kesempatan), *responsibility* (tanggung jawab), dan *support* (dukungan). Kerangka ini dapat digunakan untuk men-

ganalisis bagaimana Dasawisma sebagai manifestasi modal sosial, dapat memberdayakan masyarakat dalam konteks pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pemberdayaan, dijelaskan oleh Jørgensen dan Thoning (2017) sebagai proses di mana individu, kelompok, dan organisasi memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Konsep ini menjembatani teori modal sosial dan pemberdayaan masyarakat, menunjukkan bagaimana modal sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Agrawal dan Gibson (1999) memperkuat pemahaman ini dengan penelitian mereka tentang peran komunitas dalam konservasi sumber daya alam, menekankan pentingnya jaringan sosial dan norma-norma lokal dalam pengelolaan sumber daya bersama. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana modal sosial dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, yang sejalan dengan konsep keberlanjutan pembangunan. Uphoff (1992) lebih lanjut mengkaji peran lembaga lokal dan partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, menyoroti pentingnya organisasi berbasis masyarakat seperti Dasawisma dalam memobilisasi sumber daya dan mendorong aksi kolektif. Penelitian ini memperkuat hubungan antara modal sosial, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, Sidik (2015) meneliti potensi lokal dalam mewujudkan kema-

ndirian desa, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam pembangunan desa. Sementara itu, Sulaeman, Murti, dan Waryana (2015) mengkaji peran kepemimpinan, modal sosial, dan akses informasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, memberikan perspektif tentang bagaimana modal sosial dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keterkaitan antara teori-teori ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana Dasawisma, sebagai bentuk modal sosial, dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan desa yang partisipatif, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Modal sosial yang kuat, yang termanifestasi dalam organisasi seperti Dasawisma, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong pemberdayaan, dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi peran modal sosial, khususnya Dasawisma dalam implementasi program pembangunan di Desa Tappale. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan kunci seperti pemerintah desa, anggota Dasawisma, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. Observasi partisipatif juga akan dilakukan untuk mengamati interaksi sosial, norma-norma, dan jaringan sosial yang ada di Desa Tappale. Selain itu, peneliti mengumpulkan dan

menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti peraturan desa, laporan program pembangunan, dan data demografis desa untuk memperkuat temuan penelitian. Pemilihan informan akan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* berdasarkan kriteria tertentu seperti keterlibatan dalam program pembangunan desa dan pengetahuan tentang modal sosial di Desa Tappale. Analisis data akan dilakukan secara tematik dengan pengodean dan kategorisasi data dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data akan dijaga dengan triangulasi sumber data dan *member chec-king* kepada informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan dalam arti proses dalam tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki tujuan dalam memberikan sebuah wewenang atau kuasa (*power*) kepada masyarakat yang sifatnya lemah (*powerless*), sehingga mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada masyarakat yang sifatnya terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga akan terjadi sebuah keseimbangan (Agrawal & Gibson, 1999). Dalam kaitannya dengan sebuah tolak ukur dalam keberhasilan pada suatu program pemberdayaan adalah dengan adanya sebuah partisipasi secara langsung dari tatanan masyarakat dengan suka rela dalam membantu kegiatan pembangunan. Misalnya semakin banyak partisipasi secara langsung dari masyarakat, maka semakin besar juga peluang masyarakat dalam menjadi seseorang yang berdaya. Maka, pemberdayaan tidak selalu ber-

fokus pada hasil (output) saja melainkan juga menekankan pada setiap proses yang dijalankan dan hasil yang telah dicapainya.

Teori ACTORS mengungkapkan tentang sebuah konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh (Haque & Mantode, 2013; Jørgensen & Thoning, 2017) bahwa yang dimaksud adalah bagaimana cara dalam menjadikan masyarakat tersebut sebagai subyek yang sekiranya dapat membantu dan berperan dalam memberikan sebuah wewenang dengan tujuan untuk membebaskan diri dari hal-hal yang memiliki sifat kaku atau belum terstruktur sehingga tatanan masyarakat tersebut sangat mampu memiliki tanggung jawab terhadap segala ide (gagasan), keputusan, dan tindakannya.

Menurut pemberdayaan yang dimaksud adalah untuk mengarah pada sebuah pen-delegasian yang secara sosial, etika atau moral, antara lain sebagai berikut: dengan mendorong adanya sebuah ketabahan, dengan mendelegasikan adanya wewenang secara sosial, dengan mengatur adanya kinerja, dengan mengembangkan sebuah organisasi (baik lokal maupun eksteren), dengan menawarkan sebuah kerja sama, dengan berkomunikasi secara efisien, dengan mendorong adanya inovasi unik, dengan menyelesaikan semua masalah yang terjadi (Kesby, 2005).

Modal sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang nilai-nilai dan jaringan sosial yang memungkinkan individu dan

masyarakat untuk bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial terdiri dari tiga komponen utama: jaringan sosial, norma, dan kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian, modal sosial yang terdiri dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan (trust) memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program pembangunan di Desa Tappale.

Jaringan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial yang kuat dan aktif di Desa Tappale, khususnya melalui Dasawisma, berkontribusi signifikan dalam mendukung program pembangunan desa. Dasawisma sebagai jaringan sosial yang menghubungkan ibu-ibu dari berbagai rumah tangga, berperan dalam menyebarkan informasi tentang program pembangunan, memobilisasi partisipasi masyarakat, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat *grassroots*. Jaringan sosial Dasawisma juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keterampilan antar anggota, sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola program pembangunan. Selain itu, jaringan Dasawisma menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terwakili dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Berikut disajikan dalam tabel bentuk kegiatan Dasawisma:

Tabel 1. Kegiatan Dasawisma
Desa Tappale

Kelompok Dasawisma	Bentuk kegiatan	Dasawisma Labocing	kelola menjadi pupuk kompos/organic	
Dasawisma Tappale I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan pekarangan sebagai pasar hidup dan Apotik Hidup 2. Penghijauan pada halaman rumah 3. Penyuluhan tentang manfaat pekarangan 4. Mengadakan penyuluhan Tabulapot 	<p>Realitas pertukaran pengetahuan oleh Dasawisma terjadi melalui berbagai kegiatan dan interaksi antar anggota (Anggraini, 2021; Safitri, 2012). Pertukaran pengetahuan ini dapat berlangsung dalam pertemuan rutin Dasawisma, di mana anggota berbagi pengalaman, ide, dan keterampilan terkait program pembangunan desa. Dalam pertemuan tersebut, anggota yang memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu dapat membagikannya kepada anggota lain, sehingga terjadi transfer pengetahuan secara langsung. Selain itu, pertukaran pengetahuan juga terjadi melalui kegiatan-kegiatan praktis yang dilakukan bersama, seperti pelatihan keterampilan, demonstrasi, atau proyek kerja sama. Dalam kegiatan ini, anggota Dasawisma dapat belajar langsung dari pengalaman dan praktik nyata, serta saling berbagi tips dan trik dalam menjalankan program pembangunan. Pertukaran pengetahuan juga dapat terjadi secara informal melalui interaksi sehari-hari antar anggota Dasawisma. Diskusi santai, sharing pengalaman, dan saling memberikan saran atau solusi atas permasalahan yang dihadapi menjadi bentuk pertukaran pengetahuan yang efektif. Melalui interaksi ini, anggota Dasawisma dapat saling belajar dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan program pembangunan desa. Dengan adanya pertukaran pengetahuan yang aktif melalui berbagai saluran ini, Dasawisma sebagai jaringan</p>		
Dasawisma Tappale II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan Pelatihan Keterampilan membuat Pot menggunakan handuk 2. Pembinaan keterampilan menjahir bosara 			
Dasawisma Tarumbae	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan kerja bakti 2. Melakukan penghijauan 			
Dasawisma Matung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana air bersih 2. Pembuatan jamban 3. Penyuluhan mengenai K-3 dan sampah agar di 			

sosial dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan anggotanya, sehingga mereka lebih siap dan mampu berkontribusi dalam program pembangunan desa secara efektif.

Norma

Penelitian ini menemukan bahwa norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat Desa Tappale, seperti gotong royong, saling percaya, dan tanggung jawab bersama, sangat mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan. Norma gotong royong tercermin dalam keterlibatan sukarela masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, seperti kerja bakti, perbaikan infrastruktur, dan penanaman pohon. Norma saling percaya antar warga dan antara masyarakat dengan pemerintah desa juga mendorong kerja sama yang baik dalam pelaksanaan program pembangunan (Sulaeman, Murti, & Waryana, 2015; Sidik, 2015; Sulistiono & Baru, 2019). Masyarakat percaya bahwa pemerintah desa akan mengelola sumber daya pembangunan dengan transparan dan akuntabel, sementara pemerintah desa percaya bahwa masyarakat akan berpartisipasi aktif dan mendukung program-program yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kelompok Dasawisma Desa Tappale diperoleh bahwa pengorganisasian dalam program di Desa Tappale tersebut sudah ditata dan disusun sedemikian rupa mulai dari program yang akan diterapkan, keterlibatan seluruh masyarakat desa, hingga waktu pelaksanaan program. Salah satu contoh programnya adalah

Program K-3 yang ada di Desa Tappale adalah jum'at bersih, dimana dalam program tersebut banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan di Desa Tappale, seperti tidak membuang sampah sembarangan, ikut serta dalam kegiatan gotong royong membersihkan tumpukan sampah dan selokan, mengadakan kegiatan sosialisasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa Tappale terkait dengan pentingnya kebersihan lingkungan dan dampaknya bagi kesehatan.

Program K-3 ini bukan hanya menjadi tanggungjawab kepala desa, akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama khususnya kelompok Dasawisma, artinya setiap orang berkewajiban untuk mensukseskan program tersebut, tidak terkecuali pada pemimpin itu sendiri. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar lingkungan. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan dengan pembangunan desa, oleh sebab itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Sehingga kelompok Dasawisma melaksanakan program tersebut karena atas kesadaran mereka sendiri terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kemajuan pembangunan Desa Tappale yang mana nantinya akan memberikan pandangan yang positif kepada masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program K-3. Bentuk partisipasi dari kelompok Dasawisma itu sendiri adalah mengikuti kegiatan kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sam-

pah ke sungai serta ikut memberikan motivasi kepada masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi dalam menjalankan program K3. Partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan pembangunan desa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program pembangunan dan kemajuan suatu desa. Peran serta kepala desa juga sangat penting sebagai salah satu bentuk contoh yang baik kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang rendah terhadap keberhasilan suatu program yang telah dibuat untuk kemajuan pembangunan desa. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program K-3 sama sekali tidak terpaksa dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, masyarakat melaksanakan program tersebut atas dasar keinginan sendiri. Adapun masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi pada program tersebut dikarenakan pola pikir dan tingkat pengetahuan yang masih belum mengerti dan memahami terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Realitas penerapan norma sebagai modal sosial di Desa Tappale dapat dilihat dari beberapa contoh konkret. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur jalan desa, masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaga dan material, seperti pasir dan batu, untuk mendukung proyek tersebut. Hal ini menunjukkan kuatnya norma gotong royong dalam masyarakat. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pertemuan-pertemuan desa, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, juga cukup tinggi. Masyarakat aktif menyuarakan aspirasi dan terlibat dalam proses pen-

ambilan keputusan. Ini mencerminkan adanya norma tanggung jawab bersama terhadap pembangunan desa. Norma saling percaya juga terlihat dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana pembangunan (Sihombing, 2023). Pemerintah desa secara rutin memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui papan informasi dan pertemuan-pertemuan desa. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. Adanya sanksi sosial terhadap pelanggaran norma juga memperkuat penerapan norma sebagai modal sosial. Misalnya, jika ada warga yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong atau melanggar kesepakatan bersama, mereka akan mendapatkan teguran atau dikucilkan dari kegiatan-kegiatan sosial di desa. Dengan penerapan norma-norma sosial yang kuat ini, program pembangunan di Desa Tappale dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dan saling mendukung dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa norma sebagai modal sosial memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan keberhasilan program pembangunan di tingkat desa.

Kepercayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan faktor kunci dalam membangun kemitraan yang kuat antara masyarakat, Dasawisma, dan pem-

erintah desa dalam implementasi program pembangunan. Kepercayaan yang tinggi antara berbagai pihak ini memungkinkan adanya komunikasi yang terbuka, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan pembangunan. Fuller, Serva, dan Benamati (2007) mendefinisikan *trust* adalah kemauan untuk membuat dirinya peka pada tindakan yang diambil oleh orang yang dipercayainya berdasarkan pada rasa kepercayaan dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok Dasawisma Desa Tappale belum memenuhi dimensi *trust* karena diperoleh hasil bahwa perasaan yakin dibutuhkan untuk menyeleraskan rasa percaya diri.

Fuller, Serva, dan Benamati (2007) mendefinisikan *trust* adalah kemauan seseorang untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang akan mempercayainya, tanpa tergantung pada kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikannya. Dimensi *trust* yaitu keyakinan terhadap kemampuannya sendiri untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud merupakan perubahan untuk membawa Dasawisma Desa Tappale kearah yang lebih baik lagi agar bisa melaksanakan pemberdayaan pada masyarakat Desa Tappale secara optimal. Pemberdayaan masyarakat Desa Tappale melalui program Dasawisma sudah sepenuhnya memenuhi dimensi

trust karena anggota Dasawisma merasa yakin terhadap kemampuan untuk melakukan perubahan melalui program yang efektif dan dilihat dari masyarakat yang antusias terhadap mengikuti program Dasawisma seperti gotong royong dan pelestarian lingkungan.

Melihat konteks Desa Tappale, kepercayaan yang kuat tidak hanya memberikan pondasi untuk pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif, tetapi juga memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga desa. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah desa dan kelompok Dasawisma bertindak dengan niat baik dan transparan, mereka lebih mungkin untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Keyakinan ini menciptakan lingkaran umpan balik positif, di mana kepercayaan yang tinggi mendorong partisipasi yang lebih besar, yang pada gilirannya memperkuat hasil-hasil pembangunan yang dicapai. Lebih lanjut, implementasi program-program pemberdayaan melalui Dasawisma tidak hanya meningkatkan aspek fisik pembangunan desa, tetapi juga memperkuat modal sosial masyarakat. Dalam prosesnya, masyarakat belajar untuk bekerja sama, mempercayai satu sama lain, dan bertanggung jawab bersama. Proyek-proyek seperti gotong royong dan pelestarian lingkungan menunjukkan bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dapat ditingkatkan melalui praktik kolaboratif dan keterlibatan aktif. Dengan demikian, Desa Tappale tidak hanya mencapai tujuan pembangunan

jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kokoh untuk keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Kepercayaan masyarakat terhadap Dasawisma sebagai mitra pembangunan juga sangat tinggi. Masyarakat percaya bahwa Dasawisma akan memperjuangkan kepentingan mereka dan memastikan bahwa program pembangunan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam setiap tahapan program pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat, yang terdiri dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan, merupakan faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi program pembangunan di Desa Tappale. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat dan memelihara modal sosial perlu terus dilakukan, baik oleh masyarakat, Dasawisma, maupun pemerintah desa, untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa modal sosial, terutama melalui peran Dasawisma, memainkan peran penting dalam implementasi program pembangunan di Desa Tappale. Jaringan sosial yang aktif membantu dalam penyebaran informasi, mobilisasi partisipasi masyarakat, dan koordinasi kegiatan pembangunan di tingkat akar rumput. Norma sosial seperti

gotong royong dan saling percaya mendukung keterlibatan sukarela dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa. Kepercayaan yang tinggi antara masyarakat, Dasawisma, dan pemerintah desa memperkuat komunikasi dan partisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan masalah keberlanjutan program.

Untuk meningkatkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan jaringan sosial melalui pembentukan kelompok seperti Dasawisma, peningkatan transparansi, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai dan pelatihan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629–649.
- Anggraini, O. (2021). Rekapitalisasi Modal Sosial dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Triple

- Helix di Yogyakarta Era Normal Baru. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel*, (pp. 174–187).
- Fuller, M. A., Serva, M. A., & Benamati, J. (2007). Seeing Is Believing: The Transitory Influence of Reputation Information on E-Commerce Trust and Decision Making. *Decision Sciences*, 38(4), 675-699.
- Greeley, A. (1997). Coleman Revisited: Religious Structures as a Source of Social Capital. *American Behavioral Scientist*, 40(5), 587-594.
- Haque, A., & Mantode, K. L. (2013). Governance in the technology era: implications of actor network theory for social empowerment in South Asia. *Grand Successes and Failures in IT. Public and Private Sectors: IFIP WG 8.6 International Working Conference on Transfer and Diffusion of IT, TDIT 2013*, (pp. 375–390). Bangalore India.
- Jørgensen, S. V., & Thoning, S. D. (2017). *Participation, Empowerment and the Role of External Actors in Community-Centered Tourism: Participation, Empowerment and the Role of External Actors in Community-Centered Tourism*. Aalborg: Aalborg Universitet.
- Kesby, M. (2005). Rethorizing empowerment-through-participation as a performance in space: Beyond tyranny to transformation. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 30(4), 2037–2065.
- Milana, E., & Maldaon, I. (2015). Social capital: A comprehensive overview at organizational context. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*, 23(2), 133–141.
- Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 41–51.
- Safitri, K. R. (2012). *Resolusi Konflik Berbasis Community Governance (Studi Deskriptif Kualitatif di Kawasan Pasar Klewer Kota Surakarta)*. Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret.
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115–131.
- Sihombing, S. M. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sigumpar, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Sulaeman, E. S., Murti, B., & Waryana, W. (2015). Peran Kepemimpinan,

Modal Sosial, Akses Informasi serta Petugas dan Fasilitator Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. *Kesmas*, 9(4), 353–361.

Sulistiono, B., & Baru, B. M. (2019). Strategi Pembangunan Desa Melalui Pendayagunaan Potensi Modal Sosial. *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 3, (pp. 1825–1836).

Uphoff, N. (1992). Local institutions and participation for sustainable development. *Gatekeeper Series No. SA31*, 1-14.